

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) memiliki peran strategis dalam mempertahankan keseimbangan ekologi, meminimalkan risiko bencana alam, serta menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya air pada suatu wilayah. Meskipun demikian, implementasi Pengelolaan DAS diberbagai wilayah, termasuk Kabupaten Bandung masih dihadapkan berbagai masalah yang bersifat kompleks. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Sungai Cigentur yang terletak di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, sungai ini selalu meluap dan mengakibatkan banjir yang merendam persawahan, jalan dan permukiman penduduk di sekitar wilayah tersebut. Secara spesifik, DAS Cigentur termasuk kedalam wilayah yang didominasi oleh persawahan dan permukiman penduduk. DAS Cigentur dimulai dari Desa Karang Tunggal dan melintas 3 Desa yaitu Cigentur, Cipedes dan sangiang. DAS Cigentur termasuk kedalam wilayah Sungai Prioritas yang dilintasi oleh sistem wilayah Sungai Citarum yang terdiri dari empat Sub- DAS utama yaitu: Sub- DAS Citarik, Sub- DAS Cirasea, Sub- DAS Ciwidey, Sub- DAS Cisangkuy. SUB DAS CIRASEA memiliki jumlah DAS sebanyak 150 DAS diantaranya 35 baik, 53 rusak ringan dan rusak berat 61.

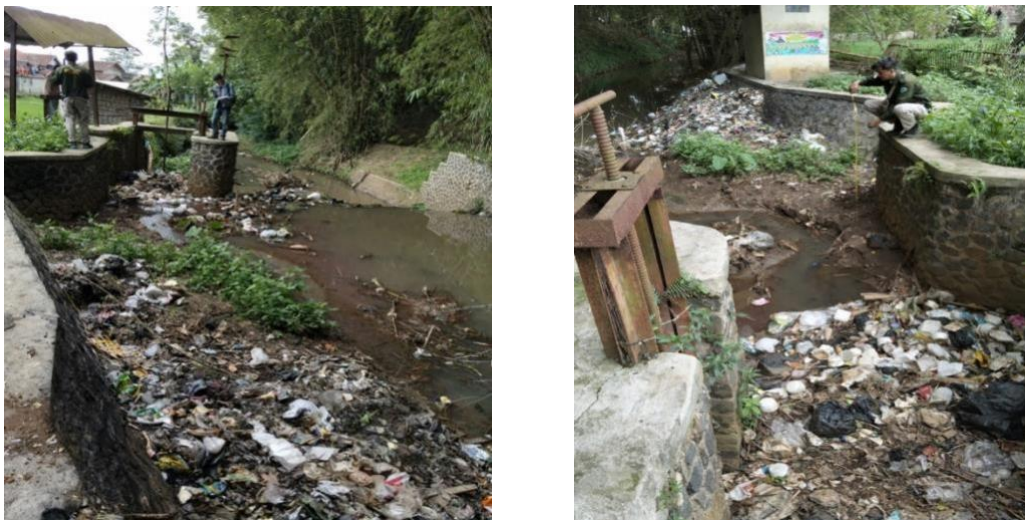
(DPUTR tahun 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari Pihak PUTR diketahui bahwa DAS Cigentur mempunyai beberapa masalah antara lain yaitu:

1. Alih fungsi lahan yang dilakukan dikawasan Hulu sampai sungai

2. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke Daerah Aliran Sungai
3. Banyaknya Bangunan dipinggiran Sungai
4. Pabrik Tahu yang membuang limbahnya ke sungai
5. Banyaknya Kotoran Sapi disungai

Dampak dari Kondisi tersebut tercermin pada meningkatnya laju erosi dan akumulasi sedimen yang mengakibatkan pendangkalan sungai serta menurunnya daya tampung air saat musim hujan, sehingga mengakibatkan meningkatnya potensi terjadinya banjir di wilayah tersebut.



Gambar 1.1 Kondisi Sungai Cigentur

Permasalahan utama dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak hanya terletak pada aspek ekologis, tetapi juga pada aspek tata Kelola dan Implementasi kebijakan. Dalam Praktiknya, masih terdapat lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan berbagai program pengelolaan DAS sering kali tidak

berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan DAS. Keterbatasan tersebut meliputi aspek anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan fasilitas yang belum memadai. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kolaborasi antar pemangku kepentingan serta kapasitas kelembagaan yang masih lemah merupakan faktor utama yang menghambat keberhasilan pengelolaan DAS di Berpikir. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas institusi, serta optimalisasi peran masyarakat guna mewujudkan pengelolaan DAS yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian Astomo (2025) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan DAS .

Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Berpikir turut dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengelolaan yang terintegrasi. Meskipun berbagai regulasi terkait pengelolaan DAS telah ditetapkan, implementasi kebijakan tersebut pada praktiknya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berkembang di lapangan. Secara empiris, sejumlah DAS di Berpikir menunjukkan tingkat kerusakan yang signifikan, yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia. Bentuk aktivitas tersebut antara lain meliputi alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan dan

implementasi di tingkat lokal. Penelitian Alsa et al. (2023) menegaskan bahwa kerusakan DAS terjadi akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali dan lemahnya implementasi kebijakan pemerintah .

Melalui Pemerintah Republik Indonesia, kebijakan mengenai pengelolaan DAS diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan Daerah aliran Sungai yang menekankan bahwa pengelolaan DAS perlu dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan demi mendukung keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan untuk PERMEN PU No 04 dan 28 tahun 2015 tentang kriteria penetapan Sungai dan Penetapan Garis Sempadan Sungai. Untuk Peraturan Daerah Provinsi diatur di No 20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah aliran Sungai yang mana diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan, mengendalikan kerusakan DAS, serta mendukung Pembangunan berkelanjutan diwilayah Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung. Di Tingkat daerah, pemerintah kabupaten Bandung turut memperkuat kebijakan tersebut melalui peraturan daerah kabupaten Bandung No 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bandung tahun 2024-2044 yang memuat peraturan yang terkait pemanfaatan ruang, perlindungan Kawasan sempadan Sungai, serta upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup juga menjadi landasan dalam pengawasan terhadap pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang terjadi diwilayah Kabupaten Bandung. Dalam implementasinya, dinas PUTR kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program pengelolaan sumber daya air, normalisasi Sungai, pemeliharaan drainase, serta pengendalian

Kawasan Sungai guna mendukung terciptanya lingkungan yang tertata dan berkelanjutan.

Permasalahan pengelolaan DAS menjadi lebih kompleks, terutama di wilayah dengan tingkat pembangunan tinggi seperti kab Bandung. Salah satu contohnya DAS Citarum yang berada dalam pencemaran yang terjadi dan membuat kebersihan dari sungai Citarum tidak terjaga. Selain itu, pembuangan tidak hanya dari sampah melainkan juga dari kotoran manusia yang berjumlah 36 ton dan kotoran lain yang berjumlah 56 ton yang berasal dari sektor peternakan yang dibuang ke sungai Citarum (Prayoga, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan DAS yang telah dilaksanakan. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas PUTR Kabupaten Bandung dalam pengelolaan DAS di Sungai Cigentur. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cigentur Oleh dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung”**.

Selain berbagai permasalahan yang telah diuraikan, dinamika pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada dasarnya juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, DAS tidak hanya dipandang sebagai entitas fisik semata, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas manusia di

dalamnya. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan DAS akan berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan (Emil Salim, Jakarta, 2010).

Di sisi lain, pendekatan pengelolaan DAS yang bersifat top-down juga kerap menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan kebijakan. Minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengawasan menyebabkan rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program-program pengelolaan DAS. Padahal, masyarakat merupakan aktor kunci yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungan DAS dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan pengelolaan DAS yang lebih inklusif dan adaptif (Astomo, 2025).

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya tekanan pembangunan yang terus meningkat, khususnya di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang tinggi seperti Kabupaten Bandung. Peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, industri, dan pertanian sering kali mengabaikan aspek daya dukung lingkungan. Akibatnya, terjadi degradasi fungsi ekologis DAS yang ditandai dengan meningkatnya erosi, sedimentasi, serta penurunan kualitas air. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi perlunya evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan DAS secara komprehensif dan berbasis kondisi empiris di lapangan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS),

khususnya di Sungai Cigentur, bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun kelembagaan. Kompleksitas tersebut menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, tetapi juga mencakup dimensi kebijakan publik yang lebih luas, termasuk efektivitas implementasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Evaluasi tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Alsa et al., 2023).

Berdasarkan urgensi diatas fokus penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip Implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi, yaitu : 1) Tepat Kebijakan, 2) Tepat Pelaksana, 3) Tepat Target, 4) Tepat Proses, 5) Tepat Proses. Selain berbagai permasalahan yang telah dijelaskan diatas, pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik yang menggunakan prinsip lima tepat dalam setiap tahapan kebijakan.

Pertisipasi Masyarakat dalam pengelolaan DAS ini juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Keterlibatan Masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas serta mendorong pemerintah untuk lebih peka terhadap permasalahan

yang ada dilapangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya partisipasi Masyarakat masih cenderung bersifat pasif dan belum partisipasi secara langsung dalam proses kebijakan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri khususnya dari Dinas PUTR dalam mengelola Daerah aliran Sungai.

Lebih jauh lagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara praktis, khususnya bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan DAS yang lebih efektif. Dengan adanya kajian yang mendalam mengenai implementasi kebijakan oleh Dinas PUTR Kabupaten Bandung, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan DAS serta meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Sungai Cigentur Kabupaten Bandung.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengenai permasalahan Daerah aliran Sungai ini karena melihat kondisi dilapangan masih ditemukannya berbagai masalah yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian berjudul “ **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cigentur oleh dinas Pekerjaan dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Pengelolaan Daerah aliran Sungai Cigentur oleh Dinas PUTR Kabupaten Bandung dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Riant Nugroho (2017) yang meliputi:

- a. Tepat lingkungan
- b. Tepat Pelaksana
- c. Tepat Target
- d. Tepat Lingkungan
- e. Tepat Proses

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cigentur oleh Dinas PUTR Kabupaten Bandung?
- 2. Bagaimana hambatan implementasi pengelolaan DAS oleh dinas PUTR kabupaten Bandung?
- 3. Bagaimana upaya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cigentur oleh Dinas PUTR Kabupaten Bandung
- 2. Untuk mengetahui bagaimana Hambatan kebijakan Pengelolaan DAS oleh

Dinas PUTR kabupaten Bandung

3. Untuk Mengetahui Bagaimana upaya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang Kabupaten Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan, pengalaman, serta memperluas wawasan peneliti, khususnya dalam penerapan berbagai teori yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk disajikan sebagai bahan masukan terhadap Dinas PUTR Kabupaten Bandung dan diharapkan menambah pengetahuan keilmuan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS oleh Dinas PUTR Kabupaten Bandung.